

Dari Birokrasi ke Kolaborasi Peran Organisasi Kepolisian melalui Program Sahabat Raimas Presisi

Muthia Agnia Ridzky¹, Afmi Apriliani²

^{1,2}Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Djuanda

mutiaa2019@gmail.com ,

*Korespondensi, Afmi Apriliani: afmi.apriliani@unida.ac.id

ABSTRAK

Transformasi peran kepolisian dari model birokrasi menuju pendekatan kolaboratif menjadi tuntutan dalam pelayanan keamanan publik perkotaan. Program Sahabat Raimas Presisi yang dijalankan oleh Polresta Bogor Kota merupakan salah satu bentuk implementasi Polri Presisi yang menekankan kemitraan antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran organisasi kepolisian dalam Program Sahabat Raimas Presisi serta bentuk pelayanan keamanan berbasis kolaborasi yang dibangun bersama masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Seksi Humas Polresta Bogor Kota dan anggota Masyarakat yang bergabung dalam program ini serta tokoh pemuda dan relawan keamanan lingkungan sebagai informan kunci serta studi dokumentasi terkait pelaksanaan program. Teknik analisis data menggunakan model analisis *interaktif Miles* dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Sahabat Raimas Presisi berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan keamanan melalui patroli bersama, komunikasi dua arah, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pencegahan dini gangguan kamtibmas seperti balapan liar dan tawuran. Program ini juga memperkuat kepercayaan dan hubungan kemitraan antara polisi dan masyarakat. Meskipun masih dihadapkan pada kendala keterbatasan sumber daya dan konsistensi partisipasi masyarakat, Program Sahabat Raimas Presisi memiliki potensi sebagai model pelayanan keamanan kolaboratif dalam konteks administrasi publik perkotaan.

Kata Kunci: Keamanan perkotaan, Kepolisian, Kolaborasi, Pelayanan, Sahabat Raimas Presisi

PENDAHULUAN

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam keberlangsungan pembangunan sosial dan kesejahteraan di kawasan perkotaan. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai lembaga penegak hukum memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga keamanan publik, mencegah tindak kriminal, serta membangun rasa aman di masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, konsep Polri Presisi yang menekankan pendekatan prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan telah menjadi landasan baru dalam pelaksanaan tugas kepolisian di seluruh Indonesia. Slogan ini tidak hanya menjadi pedoman internal, tetapi juga mendorong lahirnya berbagai inovasi pelayanan publik dan patroli kemasyarakatan yang lebih kolaboratif dan partisipatif.

Salah satu bentuk implementasi nyata di tingkat lokal adalah Sahabat Raimas Presisi, sebuah inisiatif yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung dalam kegiatan patroli keamanan bersama jajaran Polresta Bogor Kota. Program ini dirancang untuk memperkuat sinergi antara polisi dan warga dalam menjaga situasi kamtibmas serta melakukan pencegahan dini terhadap aksi kriminalitas, seperti balapan liar, tawuran, dan gangguan keamanan lainnya. Melalui kegiatan patroli malam bersama Sahabat Raimas Presisi, Polresta Bogor Kota mengajak elemen masyarakat untuk menjadi mitra aktif dalam menjaga ketertiban lingkungan mereka sendiri, bukan sekadar menjadi objek pelayanan.

Fenomena tersebut menarik perhatian karena mencerminkan perubahan peran polisi dari sekadar penegak hukum menjadi fasilitator kemitraan komunitas yang responsif terhadap kebutuhan lokal. Masyarakat tidak hanya menerima layanan, tetapi juga turut berkontribusi dalam proses menjaga keamanan bersama (*community policing*). Pendekatan semacam ini dapat meningkatkan rasa kepemilikan warga terhadap keamanan lingkungan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Oleh karena itu, studi literatur ini bertujuan mengkaji berbagai konsep,

temuan empiris, dan implikasi dari peran polisi dalam program Sahabat Raimas Presisi sebagai bagian dari model kemitraan polisi–masyarakat dalam konteks administrasi publik dan keamanan kota.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran dan pelayanan kepolisian dalam keamanan melalui Progrm Sahabat Raimas Presisi.

Informan penelitian terdiri dari :

Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Kasi Humas) Polresta Bogor Kota sebagai Informan Kunci dan anggota Masyarakat yang bergabung dalam program ini serta tokoh pemuda dan relawan keamanan lingkungan sebagai informan kunci.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui :

1. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan Kasi Humas Polresta Bogor Kota dan anggota Masyarakat yang bergabung dalam program ini serta tokoh pemuda dan relawan keamanan lingkungan sebagai informan kunci dengan pedoman wawancara yang mencakup latar belakang program, bentuk pelayanan, peran masyarakat, pola komunikasi, kendala, serta pengembangan program.
2. Studi Dokumentasi berupa penelusuran laporan kegiatan, dengan publikasi terkait Program Sahabat Raimas Presisi

Teknik data menggunakan model analisis *interaktif miles* dan *Huberman* yang meliputi reduksi data, penyajian data , serta penarikan kesimpulan , Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama, antara lain:

1. Pelayanan keamanan oleh kepolisian masih sering dipersepsikan sebagai kegiatan yang bersifat top-down dan belum sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat.
2. Tingkat kegiatan kamtibmas seperti balapan liar, tawuran, dan kriminalitas di jalanan masih menjadi tantangan di wilayah perkotaan, khususnya di Kota Bogor.
3. Belum banyak kajian yang secara khusus menganalisis peran pelayanan publik kepolisian dalam membangun pelayanan keamanan berbasis kolaborasi melalui Program Sahabat Raimas Presisi.
4. Perlu diketahui bagaimana pola komunikasi, bentuk pelayanan, serta respons masyarakat terhadap keterlibatan mereka dalam program pelayanan keamanan tersebut.

Identifikasi masalah ini menjadi dasar penting untuk mengkaji efektivitas dalam peran Program Sahabat Raimas Presisi dalam meningkatkan kualitas pelayanan keamanan publik.

PENELITIAN PENDAHULUAN

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan *community policing* mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian serta mendorong terciptanya rasa aman di masyarakat.

Penelitian tentang kemitraan polisi-masyarakat menekankan bahwa ketertiban warga dalam kegiatan keamanan dapat meningkatkan efektivitas pencegahan kejahatan dan memperkuat legitimasi pelayanan kepolisian. Namun demikian, penelitian yang secara spesifik membahas Program Sahabat Raimas Presisi sebagai

bentuk transformasi organisasi dan pelayanan publik kepolisian dari model birokrasi menuju kolaboratif masih terbatas. Oleh karena itu , penelitian ini memiliki posisi strategis untuk melengkapi kekosongan kajian tersebut, khususnya dalam konteks administrasi public dan pelayanan keamanan tingkat lokal.

LANDASAN TEORI

1. Teori Peran

Teori peran menjelaskan bahwa setiap actor dalam sistem sosial memiliki peran tanggung jawab tertentu sesuai dengan kedudukannya. Kepolisian moderen tidak lagi berfokus semata pada penegakan hukum, tetapi juga pada upaya pencegahan kejahatan dan pembangunan kemitraan dengan masyarakat (*Bayley 1994*).

Sementara itu, masyarakat berperan sebagai subjek aktif yang mendukung terciptanya keamanan lingkungan melalui partisipasi langsung dalam Program Sahabat Raimas Presisi.

2. Teori Organisasi

Teori organisasi memandang organisasi sebagai sistem terbuka yang beritraksi dengan lingkungan. Transformasi Polri menuju Polri Presisi mencerminkan perubahan organisasi kolaboratif dan adaptif. Program Sahabat Raimas Presisi merubakan wujud perubahan struktur dan budaya dalam pelayanan kepolisian yang menekankan kerjasama lintas actor , komunikasi dua arah, serta pelayanan public yang responsive terhadap kebutuhan masyarakat.

KESENJANGAN PENELITIAN

Meskipun berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan *comuniy policing* dan kemitraan polisi masyarakat berkontribusi positif terhadap peningkatan keamanan dan kepercayaan public, sebagian besar kajian masih berfokus pada konsep umum,

kebijakan nasional, atau model pelayanan kepolisian. Penelitian yang mengkaji implementasi program kolaboratif kepolisian pada tingkat lokal, khususnya Program Sahabat Raimas Presisi di Kota Bogor masih terbatas atau jarang. Selain itu, belum banyak penelitian yang menganalisis program tersebut dari perspektif teori organisasi dan administrasi public, terutama dalam transformasi peran kepolisian dari model birokratis menuju pelayanan keamanan yang kolaboratif dan partisipatif. Oleh karena itu penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut serta memberikan gambaran empiris mengenai praktik pelayanan keamanan berbasis kolaborasi di tingkat lokal.

PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Pembentukan Program Sahabat Raimas Presisi

Program Sahabat Raimas Presisi dibentuk sebagai respons terhadap kebutuhan peningkatan pelayanan keamanan yang lebih responsif dan partisipatif. Berdasarkan hasil wawancara, program ini bertujuan untuk membangun kemitraan antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga situasi kamtibmas di wilayah Kota Bogor (Wawancara, Kasi Humas Polresta Bogor Kota beserta jajarannya, 2025).

2. Masalah Pelayanan Keamanan yang Ingin Diatasi

Program ini difokuskan untuk mengatasi berbagai permasalahan keamanan seperti balapan liar, tawuran, serta gangguan ketertiban masyarakat lainnya yang sering terjadi pada malam hari. Pendekatan kolaboratif dipandang lebih efektif dibandingkan pola pengamanan konvensional. wawancara menunjukkan bahwa permasalahan utama yang ingin diatasi melalui program ini adalah balapan liar, tawuran remaja, serta gangguan ketertiban umum lainnya. Menurut pihak kepolisian, keterbatasan personel membuat pendekatan kolaboratif menjadi strategi yang relevan.

Sementara itu, masyarakat menilai bahwa sebelum adanya program Sahabat Raimas Presisi, banyak gangguan keamanan yang tidak tertangani secara cepat karena minimnya komunikasi antara warga dan aparat. Setelah program berjalan, masyarakat merasa lebih mudah menyampaikan informasi awal kepada pihak kepolisian. Kondisi ini

mengindikasikan bahwa kolaborasi polisi–masyarakat meningkatkan efektivitas deteksi dini gangguan kamtibmas.

3. Bentuk Pelayanan Keamanan

Pelayanan keamanan diwujudkan melalui kegiatan patroli bersama antara anggota kepolisian dan masyarakat, penyampaian edukasi kamtibmas, serta respons cepat terhadap laporan gangguan keamanan. Pola ini menunjukkan perubahan peran polisi dari sekadar penegak hukum menjadi mitra masyarakat. Pelayanan keamanan diwujudkan melalui patroli malam bersama, dialog langsung dengan warga, serta penyampaian edukasi kamtibmas. Kepolisian tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator keamanan lingkungan.

Salah satu informan masyarakat menyatakan bahwa kehadiran polisi yang berinteraksi langsung tanpa jarak formal membuat masyarakat merasa lebih nyaman dan terbuka dalam menyampaikan keluhan maupun potensi masalah keamanan. Bentuk pelayanan ini mencerminkan prinsip *new public service* yang menekankan pelayanan berbasis kemitraan, bukan sekadar pengendalian.

4. Peran dan Keterlibatan Masyarakat

Masyarakat berperan sebagai mitra aktif yang turut serta dalam kegiatan patroli dan memberikan informasi awal terkait potensi gangguan keamanan. Keterlibatan ini memperkuat rasa tanggung jawab bersama terhadap keamanan lingkungan. Masyarakat berperan sebagai mitra strategis dalam patroli bersama dan pemberi informasi awal terkait potensi gangguan keamanan. Keterlibatan ini meningkatkan rasa tanggung jawab kolektif terhadap keamanan lingkungan.

Menurut salah satu peserta Sahabat Raimas Presisi, keterlibatan langsung dalam patroli menumbuhkan kesadaran bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab polisi, tetapi juga masyarakat. Temuan ini sejalan dengan teori peran yang menempatkan masyarakat sebagai aktor aktif dalam sistem pelayanan publik.

5. Pola Komunikasi Polisi dan Masyarakat

Komunikasi dalam Program Sahabat Raimas Presisi dilakukan secara dua arah, baik melalui interaksi langsung saat patroli maupun melalui media komunikasi informal. Pola komunikasi ini mendorong terbangunnya kepercayaan antara polisi dan masyarakat. Pola komunikasi yang terbangun bersifat dua arah dan informal, baik melalui interaksi langsung saat patroli maupun melalui media komunikasi sederhana. Masyarakat merasa lebih mudah menjangkau pihak kepolisian tanpa rasa takut atau sungkan. Pola komunikasi ini memperkuat kepercayaan publik dan mendukung keberlanjutan kolaborasi.

6. Respons Masyarakat terhadap Program

Respons masyarakat terhadap program ini cenderung positif. Masyarakat merasa lebih dilibatkan dan dihargai dalam proses pelayanan keamanan, sehingga meningkatkan rasa aman dan kepercayaan terhadap institusi kepolisian. Respons masyarakat terhadap Program Sahabat Raimas Presisi secara umum positif. Masyarakat merasa dihargai, dilibatkan, dan memiliki ruang untuk berkontribusi dalam pelayanan keamanan. Respons positif ini menunjukkan meningkatnya legitimasi pelayanan kepolisian di mata masyarakat.

7. Pengaruh Program terhadap Kualitas Pelayanan Keamanan

Program Sahabat Raimas Presisi dinilai berpengaruh dalam meningkatkan kualitas pelayanan keamanan, khususnya dalam aspek pencegahan dan deteksi dini gangguan kamtibmas. Baik kepolisian maupun masyarakat mengakui adanya kendala berupa keterbatasan sumber daya dan fluktuasi partisipasi warga. Namun demikian, masyarakat berharap program ini tetap berlanjut dan diperluas.

8. Kendala Pelaksanaan Program

Beberapa kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia, konsistensi partisipasi masyarakat, serta kebutuhan koordinasi yang intensif antar pihak. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci dan beberapa informan pendukung, pelaksanaan Program Sahabat Raimas Presisi menghadapi sejumlah kendala struktural dan

partisipatif. Dari sisi internal, keterbatasan sumber daya manusia kepolisian menjadi tantangan utama dalam menjaga intensitas patroli dan pendampingan masyarakat secara berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan program belum dapat menjangkau seluruh wilayah secara merata.

Dari perspektif masyarakat, beberapa informan menyampaikan bahwa konsistensi partisipasi warga masih fluktuatif, terutama dipengaruhi oleh kesibukan kerja dan kurangnya regenerasi peserta. Salah satu informan masyarakat menyatakan bahwa “antusiasme warga biasanya tinggi di awal, tetapi menurun ketika kegiatan berlangsung rutin dan tidak semua warga bisa terus ikut” (Wawancara, Informan Masyarakat, 2025)

9. Rencana Pengembangan Program

Ke depan, Polresta Bogor Kota berencana memperluas jangkauan program serta memperkuat kapasitas masyarakat melalui pembinaan dan pelatihan berkelanjutan. Hasil harus jelas dan ringkas. Diskusi harus mengeksplorasi signifikansi hasil pekerjaan, bukan mengulangnya. Hindari kutipan dan diskusi ekstensif tentang literatur yang diterbitkan. Sebagai respons terhadap berbagai kendala tersebut, Polresta Bogor Kota merencanakan pengembangan Program Sahabat Raimas Presisi melalui perluasan jangkauan wilayah serta penguatan kapasitas masyarakat. Upaya ini diarahkan pada peningkatan kualitas partisipasi, bukan sekadar penambahan jumlah peserta.

Beberapa informan kepolisian dan masyarakat menilai bahwa pembinaan dan pelatihan berkelanjutan menjadi kebutuhan penting agar masyarakat memiliki pemahaman yang sama terkait peran dan batasan dalam kegiatan patroli bersama. Salah satu informan menyampaikan bahwa “kalau ada pelatihan rutin, warga jadi lebih siap dan tidak ragu saat ikut patroli” (Wawancara, Informan Sahabat Raimas Presisi, 2025). Pengembangan program juga dipandang sebagai upaya memperkuat kepercayaan dan kemitraan jangka panjang antara polisi dan masyarakat. Dengan peningkatan kapasitas dan komunikasi yang lebih terstruktur, program ini berpotensi menjadi model pelayanan keamanan kolaboratif yang berkelanjutan di wilayah perkotaan

KESIMPULAN

Program Sahabat Raimas Presisi merupakan bentuk transformasi pelayanan keamanan kepolisian menuju model kolaboratif berbasis kemitraan dengan masyarakat. Program ini mampu meningkatkan kualitas pelayanan keamanan dan memperkuat hubungan polisi–masyarakat di Kota Bogor. Meskipun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, program ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai model pelayanan keamanan perkotaan yang partisipatif. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melibatkan lebih banyak informan dan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak program secara lebih luas.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pelayanan keamanan berbasis kolaborasi melalui Program Sahabat Raimas Presisi tidak hanya berkontribusi pada peningkatan situasi kamtibmas, tetapi juga memperkuat hubungan sosial antara aparat kepolisian dan masyarakat. Program ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan praktik administrasi publik, khususnya dalam mendorong pelayanan publik yang partisipatif, inklusif, dan berorientasi pada kemitraan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melibatkan cakupan wilayah yang lebih luas serta pendekatan metodologis yang beragam guna mengukur dampak program secara lebih komprehensif

REFERENSI

- Poresta Bogor Kota (2025) wawancara dengan Kepala Seksi Hubungan Masyarakat
Polresta Bogor Kota: Ipda Eko Agus S.H terkait Program Sahabat Raimas
Presisi
- Bayley, D. H. (1994). *Police for the future*. Oxford University Press.

- Goldstein, H. (1990). *Problem-oriented policing*. McGraw-Hill.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Osborne, S. P. (2010). *The new public governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance*. Routledge.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The new public service: Serving, not steering* (4th ed.). Routledge.
- Skogan, W. G. (2006). *Police and community in Chicago: A tale of three cities*. Oxford University Press.
- Cordner, G. (2014). *Community policing*. Dalam *The Oxford handbook of police and policing*. Oxford University Press.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang *Pemolisian Masyarakat*.
- Pratama, A., & Rahmawati, I. (2022). *Community policing dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian*. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 145–158.
- Setiawan, D. (2021). *Transformasi organisasi kepolisian dalam pelayanan publik berbasis kolaborasi*. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(1), 33–45.
- Sutrisno, E. (2019). *Pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat*. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 7(2), 101–112.
- Dwiyanto, A. (2017). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Thoha, M. (2016). *Birokrasi dan politik di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative governance in theory and practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.

Skogan, W. G. (2006). *Police and community in Chicago: A tale of three cities*.

Oxford: Oxford University Press.

Thoha, M. (2016). *Birokrasi dan politik di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sutrisno, E. (2019). Pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 7(2), 101–112.

Setiawan, D. (2021). Transformasi organisasi kepolisian dalam pelayanan publik berbasis kolaborasi. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(1), 33–45.

Pratama, A., & Rahmawati, I. (2022). Community policing dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 145–158.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat.

Polresta Bogor Kota. (2025). Wawancara dengan Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polresta Bogor Kota terkait Program Sahabat Raimas Presisi.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.

Wahab, S. A. (2016). *Analisis kebijakan publik*. Malang: UMM Press.

Sinambela, L. P. (2017). *Reformasi pelayanan publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Mahmudi. (2015). *Manajemen kinerja sektor publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Nugroho, R. (2018). *Public policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Widodo, J. (2020). *Analisis kebijakan publik*. Malang: Media Nusa Creative.

Handayani, S. (2014). *Administrasi pemerintahan dalam pembangunan nasional*. Jakarta: Gunung Agung.

Hasibuan, M. S. P. (2017). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Pasolong, H. (2013). Teori administrasi publik. Bandung: Alfabeta.

Wibawa, S. (2011). Evaluasi kebijakan publik. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Dunn, W. N. (2018). Public policy analysis. New York: Routledge.

UNDP. (2019). Governance for sustainable development. United Nations
Development Programme.